

# PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PILKADA DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018

Eduard Adiputra Abanat

NPP. 30.1109

*Asdaf Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur*

*Program Studi Politik Indonesia Terapan*

Email: edhuadiputra@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Arwanto Harimas Ginting, S.STP, M.Si

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** Community political participation in South Central Timor District, which in this case is related to electoral activities, is still considered low and getting lower in each election period, because there are still many people who are registered in the DPT but do not participate by voting for the regional head candidates who have run for office. **Purpose:** The purpose of this research is to find out what are the factors and influence the number of participants in the 2018 regional elections so that the percentage of voters in the 2018 period is lower than the others. **Method:** This research uses qualitative methods with data collection techniques of interviews and documentation studies. Community political participation according to Miriam Budiarto is used as a measuring tool in analyzing the level of community participation. **Result:** The strategy of the organizers themselves to increase the political participation of the people of South Central Timor is to increase socialization in a more creative way to attract public interest in politics, use Democracy volunteers such as traditional and religious leaders to conduct socialization as the closest party to the community and conduct socialization in the form of introduction to the community through social media that is currently popular among the community. **Conclusion:** that there are factors that influence the decline in the level of political participation of the people of South Central Timor, namely public awareness, data on permanent voters and the lack of adequate facilities for the organizers and the community. so that the KPU increases programs and socialization that are useful and interesting as well as training in the use of technology for the community to increase community political participation.

**Keywords:** Political Participation; society; *Pilkada*.

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Timor Tengah selatan yang dalam hal ini terkait dengan aktivitas elektoral masih dianggap rendah dan semakin rendah di setiap periode pemilihan, karena masih banyak masyarakat yang terdaftar dalam DPT namun tidak ikut berpartisipasi dengan bentuk memilih para calon kepala daerah yang telah mencalonkan diri. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor dan mempengaruhi jumlah partisipan pada pilkada ditahun 2018 sehingga presentase jumlah pemilih pada periode 2018 lebih rendah dibandingkan yang lain. **Metode:** Penelitian ini

menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan studi dokumentasi. Partisipasi politik masyarakat menurut Miriam Budiarmo dijadikan alat ukur dalam menganalisis tingkat partisipasi masyarakat. **Hasil/Temuan:** Strategi dari pihak penyelenggara sendiri untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat Timor Tengah Selatan ialah dengan memperbanyak sosialisasi dengan cara yang lebih kreatif agar menarik minat masyarakat dalam politik, menggunakan para relawan Demokrasi seperti tokoh adat dan agama untuk melakukan sosialisasi sebagai pihak yang paling dekat dengan masyarakat serta melakukan sosialisasi berupa pengenalan kepada masyarakat melalui media sosial yang sedang terkenal dikalangan masyarakat. **Kesimpulan:** bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi turunnya tingkat partisipasi politik masyarakat Timor Tengah Selatan ialah kesadaran masyarakat, data para pemilih tetap dan kurangnya fasilitas yang memadai bagi pihak penyelenggara dan masyarakat. agar KPU memperbanyak program serta sosialisasi yang berguna dan menarik serta pelatihan penggunaan teknologi bagi masyarakat untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

**Kata kunci:** Partisipasi Politik; Masyarakat; Pilkada.

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Partisipasi politik masyarakat merupakan salah satu komponen yang penting bagi jalannya pemerintahan disuatu daerah maupun sebuah negara dan salah satu cara masyarakat dalam mendukung jalannya pemerintahan dengan berpartisipasi dalam kegiatan politik contohnya pemilu. Menurut Putri (2016) mengatakan bahwa pada dasarnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilu adalah hal yang penting dan dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengontrol jalannya pemerintahan. Hal ini tentunya dapat kita lihat dari jalannya pemerintahan yang dipilih masyarakat dalam pelaksanaan pemilu, baik buruknya pemerintahan suatu daerah ditentukan oleh masyarakat dalam pelaksanaan pemilu yang berlangsung sekali dalam kurun waktu 5 tahun. Oleh karena itu partisipasi politik dari masyarakat pada saat pemilu sangat penting karena akan sangat berpengaruh dalam jalannya pemerintahan dalam 5 tahun kedepan.

Ketika berbicara tentang partisipasi politik masyarakat maka tidak lepas dari yang namanya kesadaran politik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang berjalan. Menurut Arniti (2020) partisipasi politik, legitimasi dan demokrasi memiliki kerangka hubungan yang sangat erat karena hubungan antara partisipasi politik dengan demokrasi selalu memberi pengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada jalannya pemerintahan. Misalnya pada saat pelaksanaan kegiatan pemilu masyarakat sendiri memiliki pilihan dan kepentingan masing-masing dalam menentukan pilihan masyarakat terhadap para calon pemimpin dan pemangku kebijakan yang mengajukan diri sebagai kandidat dalam pelaksanaan kegiatan pemilu. Jika masyarakat sendiri masih belum ataupun tidak peduli dengan politik didaerahnya sendiri, tentunya bisa dikatakan bahwa partisipasi politik dari masyarakat kurang baik sehingga kontrol dari masyarakat terhadap jalannya pemerintahan belum maksimal seperti yang diharapkan.

Salah satu permasalahan yang ada mengenai partisipasi politik masyarakat yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik dalam hal ini tinggi dan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat. Rendahnya partisipasi politik masyarakat pada umumnya muncul karena adanya sikap apatis dan tidak peduli dalam kegiatan politik layaknya pemilu (Amanda et al., 2019). Masyarakat lebih banyak yang memilih untuk melakukan pekerjaan, berolahraga, bertamasya dan sebagainya karena masyarakat pada umumnya berpikir bahwa kegiatan politik bukanlah kegiatan yang penting untuk diikuti oleh mereka tapi kenyataannya kegiatan politik (pemilu) merupakan kegiatan yang akan menentukan bagaimana keadaan negara maupun daerah mereka dalam 5 tahun kedepan. Oleh karena itu salah satu tugas yang harus dilakukan oleh pemerintah maupun para elit politik daerah bahkan tokoh masyarakat



yaitu meningkatkan partisipasi politik masyarakat luas demi kesuksesan jalannya pemerintahan seperti yang diharapkan.

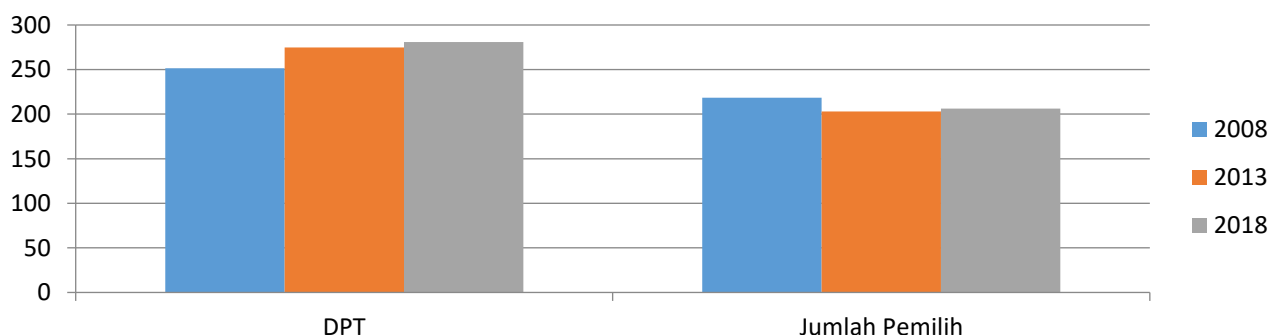
Partisipasi masyarakat Indonesia sendiri dapat diukur dengan cara melihat perilaku politiknya. Menurut Hendrik (2010) mengatakan bahwa perilaku politik dari masyarakat Indonesia dapat kita lihat melalui seberapa antusias masyarakat yang mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) pada saat diselenggarakannya pesta demokrasi hal ini dapat kita lihat pada saat pelaksanaan kegiatan pemilu, jika pada tempat pemungutan suara tertentu sepi atau hanya sedikit orang yang berkunjung dan melaksanakan pemilihan maka partisipasi politik dari masyarakat disekitarnya dapat dikatakan rendah tapi jika pada tempat pemungutan suara tersebut banyak masyarakat yang datang dan ikut berpartisipasi dalam pemungutan suara maka partisipasi politik masyarakat sudah bisa dikatakan tinggi. Demikian salah satu cara mudah dalam mengukur partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pemilihan umum. Kegiatan pemilihan umum juga tentunya dilaksanakan secara khusus dalam setiap provinsi yang ada di Indonesia, dalam pelaksanaan kegiatan pemilihan umum di daerah terdapat salah satu kegiatan pemilihan yang diikuti oleh masyarakat secara luas yaitu pemilihan kepala daerah atau pilkada yang dilaksanakan untuk memilih calon kepala daerah baik gubernur maupun bupati yang dilaksanakan dalam lingkup provinsi untuk pemilihan Gubernur dan dalam lingkup kabupaten untuk pemilihan Bupati.

## 1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Melihat bagaimana partisipasi masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam pelaksanaan pilkada maka dapat dilihat bahwa partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Selatan ternyata mengalami penurunan pada tahun 2013 yang bila dibandingkan dengan tahun 2008, maka dapat dilihat bahwa menurunnya angka yang sangat drastis dari segi jumlah pemilih pada saat pemilihan atau berkurangnya partisipasi politik masyarakat dari segi aktivitas elektoral. Kemudian pada tahun 2018 jumlah pemilih pada pilkada 2018 kembali naik namun dapat dikatakan tidak seperti jumlah pemilih pada tahun 2008. Jumlah kenaikan pemilih pada pilkada tahun 2018 memiliki selisih yang dapat dikatakan cukup sedikit dengan jumlah pemilih ditahun 2013 dan jika dibandingkan dengan menurunnya jumlah pemilih ditahun 2008 yang memiliki partisipasi politik cukup tinggi dari aspek aktivitas elektoral masyarakat. Jumlah pemilih pada pilkada di Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam 3 periode terakhir tersebut dapat dilihat dalam grafik berikut ini.

**Grafik 1.1**

### Jumlah Pemilih Dalam 3 Periode Terakhir



Dapat dilihat pada grafik diatas bahwa adanya selisih yang besar antara jumlah daftar pemilih terdaftar dan jumlah pemilih yang terjadi pada setiap periode pemilihan kepala daerah di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Jika hal tersebut dihitung dengan menggunakan presentase maka dapat dilihat bahwa pada tahun 2008 terdapat 86,99% jumlah pemilih yang hadir pada saat pemilihan dan pada tahun 2013 terdapat 73,81% jumlah pemilih yang hadir pada saat pemilihan, kemudian jumlah presentase paling

sedikit ada pada tahun 2018 yaitu 73,50% jumlah pemilih yang hadir pada saat pemilihan. Hal ini cukup menggambarkan bahwa partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Timor Tengah selatan yang dalam hal ini terkait dengan aktivitas elektoral masih dianggap rendah dan semakin rendah di setiap periode pemilihan, karena masih banyak masyarakat yang terdaftar dalam DPT namun tidak ikut berpartisipasi dengan bentuk memilih para calon kepala daerah yang telah mencalonkan diri. Oleh karena itu, hal ini tentunya menjadi perhatian bagi peneliti untuk dapat mengetahui apa saja yang menjadi faktor dan mempengaruhi jumlah partisipan pada pilkada ditahun 2018 sehingga presentase jumlah pemilih pada periode 2018 lebih rendah dibandingkan yang lain dan mencari informasi tentang apa saja faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat yang menyebabkan besarnya angka golput atau selisih antara DPT dan suara sah pada saat pemilihan kepala daerah ditahun 2018

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian ini penulis mengambil berbagai referensi terutama penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam konteks partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada. Penelitian Siti Khikmatul Rizqi berjudul Partisipasi Politik Masyarakat pada PILKADA 2017 di Kabupaten Yalimo, Papua, Indonesia, menemukan bahwa pilkada yang dilaksanakan dianggap tidak sesuai seperti hasil yang diharapkan karena kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah terkait dengan ketentuan pemilihan atau pemberian suara kepada masyarakat (Rizqi, 2018). Penelitian berjudul “Analisis Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilkada Kabupaten Ciamis Tahun 2018” yang dilakukan oleh Darna menemukan bahwa Pilkada serentak di Kabupaten Ciamis dinilai memiliki makna strategis karena dengan adanya potensi lokal dan pendidikan politik namun sampai saat ini masih terabaikan oleh pihak pemerintah (Darna, 2019). Penelitian Sa’ban dan Wijaya terkait Kurangnya Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala daerah di Kabupaten Wakatobi, menemukan bahwa Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kurangnya partisipasi politik di Kabupaten Wakatobi yaitu faktor teknis, administratif, sosialisasi dan faktor politik (Sa’ban & Wijaya, 2018).

### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Beberapa kesimpulan singkat yang dikutip peneliti dari penelitian sebelumnya diatas menunjukkan bahwa para peneliti sebelumnya hanya meneliti tentang hasil dari partisipasi politik tersebut dan hanya mengetahui penyebab dari hasil penelitian tentang partisipasi politik dimaksud. Pada penelitian ini, peneliti akan menganalisis apa saja faktor yang memengaruhi partisipasi politik pada pilkada 2018 di Kabupaten Timor Tengah Selatan serta mengetahui strategi yang dimiliki oleh pemerintah untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai partisipasi pemuda dalam Program Lorong Literasi Gowa di Kelurahan Paccinongang Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.

## **II. METODE**

penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pada umumnya penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif adalah penelitian naturalistik, dapat dikatakan kualitatif karena sifat data yang digunakan adalah kualitatif dan bukan kuantitatif serta tidak menggunakan alat pengukur. Selain itu, dapat disebut naturalistik karena situasi



yang terjadi di lapangan adalah situasi yang bersifat alami dan wajar tanpa adanya manipulasi yang diatur dengan eksperimen atau test (Nasution, 2003).

Penelitian ini menggunakan *Convergent Parallel Mixed Method* dan menganalisis data melalui *joint display* yakni menyajikan kedua kelompok data baik itu kualitatif ataupun kuantitatif (Sugiyono, 2013). Dalam tipe *convergent* ini Creswell menjelaskan bahwa peneliti dalam waktu yang sama mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif, menganalisis secara terpisah, dan membandingkan hasilnya untuk mengetahui apakah temuannya itu saling melengkapi atau tidak (Creswell John W., 2018).

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi hal ini sejalan dengan pendapat Catherine Marshall, Gretchen B. Rossman dalam Sugiyono (2016) menjelaskan bahwa “*the fundamental methods relied on by qualitative researchers for gathering information are, participation in the setting, direct observation, in-depth interviewing, document review*”. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap informan yang ditentukan melalui teknik Purposive Sampling sehingga informan yang dipilih merupakan informan yang memiliki pengetahuan terkait permasalahan yang terjadi. Proses analisis dari berbagai temuan yang ada di lapangan menggunakan teori partisipasi politik dari Budiardjo (2003) yang membagi partisipasi politik kedalam tiga dimensi yaitu Electoral Activity, Lobbying, Organizational Activity

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis Partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada 2018 Kabupaten Timor Tengah Selatan menggunakan pendapat dari Budiardjo yang menyatakan bahwa partisipasi politik dapat terjadi pada tiga tahap, yaitu partisipasi dalam Aktivitas Elektoral, Lobbying dan Organizational activity. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

#### **3.1. Aktivitas Elektoral**

Dalam sebuah pesta demokrasi layaknya pilkada sudah menjadi kewajiban atau hak masyarakat luas untuk menggunakan hak pilih atau ikut serta dalam memilih para calon pemimpin daerah mereka sendiri. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap hasil yang akan didapatkan pada akhir pemilihan yaitu para calon yang men ang dapat dipastikan sudah dipilih secara adil dan transparan oleh seluruh masyarakat yang sudah bisa menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon pemimpin di daerahnya. Kegiatan pemilihan tersebut telah selesai dilaksanakan dan dianggap berhasil oleh pihak penyelenggara yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan walaupun terjadi penurunan presentase jumlah pemilih yang ikut serta memilih dalam pelaksanaan pilkada tersebut. Penurunan ini selaras dengan data yang dimiliki penulis pada latar belakang karena presentase jumlah pemilih yang berpartisipasi pada hari pemilihan di pilkada tahun 2018 hanya berada pada angka 73,50% yang berarti kurang dari 80% yang merupakan target minimal dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan sehingga partisipasi politik masyarakat pada hari pemilihan di tahun 2018 dapat terbilang rendah.

Penulis simpulkan bahwa pihak penyelenggara pilkada mengakui kurangnya partisipasi politik masyarakat yang terjadi pada hari pemilihan. Namun jika dilihat dari pernyataan masyarakat, masyarakat perwakilan dari 3 daerah tersebut mengatakan bahwa masyarakat cukup antusias dalam melaksanakan pemilihan. Tetapi, dari data yang ada pada situs resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan, tingkat partisipasi masyarakat pada hari pemilihan hanya menyentuh angka 73,50% jika dihitung berdasarkan daftar pemilih tetap (DPT).

Dari kegagalan pihak penyelenggara pilkada dalam menyadarkan masyarakat dan mengajak masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada pilkada di tahun 2018 maka hal tersebut tentunya menjadi pelajaran penting bagi pihak penyelenggara untuk dapat bekerja lebih keras dalam

meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan pesta demokrasi berikutnya. Masyarakat pun juga harus meningkatkan kesadaran diri mengenai betapa pentingnya hak pilih mereka bagi pembangunan yang terjadi di daerah mereka dengan mengikuti kegiatan pendidikan politik yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum.

### **3.2. Lobbying**

Menurut Miriam Budiardjo (2008) mengatakan bahwa lobbying merupakan kegiatan melobi demi memperjuangkan kepentingan individu atau suatu kelompok orang. Dalam kegiatan pesta demokrasi, hal ini tentunya merupakan suatu hal yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan pilkada. Bentuk kegiatan lobi dapat dilihat dari bagaima dalam rangkaian pelaksanaan pilkada di tahun 2018, KPU menerima berbagai jenis tanggapan dari masyarakat dimulai dari tahap persiapan hingga sampai ke pelaksanaan dan hal tersebut berkaitan dengan kinerja para pegawai KPU dalam melaksanakan tugas, hingga sampai ke akhir pelaksanaan masih masuk tanggapan dari komponen masyarakat mengenai hasil dari pemungutan suara. Masukan ke KPU tersebut datang dalam bentuk tanggapan masyarakat secara daring atau melalui situs resmi KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan dan ada juga beberapa yang langsung bersurat ke KPU TTS. Selain kegiatan lobi yang dilaksanakan di KPU, masyarakat juga terlibat aktif dalam melakukan pendekatan dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dimana hal ini di ungkapkan oleh Kepala Badan Kesbangpol yang menjelaskan bahwa Selama pelaksanaan pilkada pada tahun 2018, Kesbangpol juga menerima beberapa masukan dari masyarakat mengenai persiapan dan hasil dari pemilihan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan pilkada tersebut yang adanya gugatan dari masyarakat yang mendukung salah satu calon sehingga terjadi pemilihan ulang pada beberapa TPS dan dilanjutkan hasil pilkada tersebut diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Berbagai fakta yang disajikan diatas menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan juga berpartisipasi dalam kegiatan melobi. Hal ini merupakan salah satu bukti yang didapat penulis dari hasil wawancara terhadap beberapa informan yang bersedia memberikan informasi kepada penulis mengenai kegiatan lobbying yang dilakukan oleh masyarakat Timor Tengah Selatan. Jika dilihat dari aspek aktivitas melobi maka dapat dikatakan masyarakat telah berpartisipasi dengan baik dalam kegiatan melobi demi kepentingan masyarakat tersebut.

### **3.3. Organizational activity**

Berdasarkan teori yang digunakan penulis dalam pelaksanaan penelitian ini yaitu teori partisipasi politik yang dikemukakan oleh Miriam Budiardjo (2008) maka terdapat salah satu dimensi dalam teori tersebut yaitu aktivitas organisasi yang meliputi partai politik dan organisasi yang dibentuk untuk menopang kepentingan kelompok orang dalam pelaksanaan pilkada. Oleh karena itu penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan mengenai aktivitas organisasi yang terjadi di Kabupaten Timor Tengah Selatan selama pelaksanaan pilkada tahun 2018. Dalam indikator ini penulis menyesuaikan dengan kondisi yang ditemukan di lapangan dimana Organisasi merupakan komponen penting bagi jalannya suatu pesta demokrasi dan jika berbicara mengenai organisasi politik maka contoh utamanya adalah partai politik yang merupakan peserta pilkada. Partai politik tentunya aktif dalam melakukan kegiatan yang dapat menarik simpati masyarakat untuk mendukung partai politik



tersebut. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh partai politik yaitu kampanye politik dan selalu diikuti oleh masyarakat. Masyarakat yang antusias dalam kegiatan tersebut bukan saja yang tergabung dalam anggota partai namun banyak juga masyarakat biasa yang ikut hadir dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak partai. Selain itu Dalam pelaksanaan pilkada di tahun 2018, banyak anggota partai politik yang menarik simpati masyarakat dengan kegiatan berorganisasi. Tidak jarang kami melihat para anggota partai politik yang turun ke kelompok tani dan memberii bantuan dan berbagai organisasi lainnya. Lalu untuk masyarakat sendiri, selama pilkada tahun 2018 tidak ada yang membentuk organisasi dengan tujuan politik.

### **3.4. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat**

Jika melihat pada dinamika presentase partisipasi masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Selatan maka tentu saja ada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat tersebut. Adapun faktor penghambat dan faktor pendukung dalam dinamika tingkat partisipasi masyarakat pada pilkada tersebut. Hal ini tentunya menjadi hal yang lumrah terjadi dalam suatu dinamika naik dan turunnya sebuah presentase baik dalam bentuk angka maupun dalam bentuk lainnya. Berdasarkan hasil dari pelaksanaan wawancara yang telah dilakukan penulis pada saat penelitian, penulis menemukan beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan persiapan pilkada tahun 2018 dan berdampak pada partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Tiimor Tengah Selatan, antara lain :

1. Kesadaran masyarakat
2. Kendala administrasi daftar pemilih tetap
3. Mobilitas akses ke daerah terpencil

Faktor diatas dapat menghambat tingkat partisipasi masyarakat dan juga dapat menghambat tahapan persiapan pelaksanaan pilkada tersebut dan hal ini dikemukakan oleh Bapak Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan. Dalam meilhat dinamika tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Selatan pada pilkada tahun 2018, tentu saja terdapat faktor yang mendukung tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Selatan sehingga dapat menyentuh presentase di angka 73,50%. Salah satu faktor pendukung yang ada pada pilkada tahun 2018 di Kabupaten Timor Tengah Selatan yaitu adanya politik identitas. faktor yang mendukung tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah politik identitas dan hal ini merupakan hal yang lumrah terjadi di Kabupaten Timor Tengah Selatan karena setiap suku di Kabupaten Timor Tengah Selatan ingin orang dari sukunya sendiri yang memimpin Kabupaten Timor Tengah Selatan.

### **3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang diteliti oleh penulis berdasarkan teori Miriam Budiardjo (2008) dapat dikatakan belum maksimal. Kegiatan pilkada tahun 2018 di Kabupaten Timor Tengah Selatan telah diselenggarakan dengan baik oleh pihak penyelenggara yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan. Akan tetapi, partisipasi masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2018 relatif masih rendah, yaitu sebesar 73,50% jika dibandingkan dengan tahun 2008 sebesar 86,99% dan tahun 2013 sebesar 73,81%. Hal tersebut diakibatkan kurangnya kesadaran dari masyarakat betapa pentingnya hak pilih mereka terhadap hasil dari pelaksanaan pilkada tersebut. Sama halnya dengan temuan Sa'ban dan Wijaya (2018) bahwa Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kurangnya partisipasi politik di Kabupaten Wakatobi yaitu faktor teknis, administratif, sosialisasi dan faktor politik. dalam temuan penelitian yang dilakukan, penulis menemukan beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam

proses partisipasi masyarakat yaitu adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri dan minimnya fasilitas atau akses yang harus ditempuh oleh panitia penyelenggara pilkada tersebut ke daerah terpencil sehingga dapat dikatakan rumit bagi panitia penyelenggara untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat di tempat terpencil.

Partisipasi politik masyarakat dalam menyambut Pilkada 2018 Kabupaten Timor Tengah Selatan mengalami sedikit persoalan yang berbeda dengan salah satu penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Siti Khikmatul Rizqi yang membahas tentang Partisipasi Politik Masyarakat pada PILKADA 2017 di Kabupaten Yalimo, Papua, Indonesia. Perbedaan tersebut terletak pada kendala yang disebabkan oleh masalah pada masing-masing subjek penelitian, Jika penelitian Siti mengalami kendala pada kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah terkait dengan ketentuan pemilihan atau pemberian suara yang berdampak kepada masyarakat. Sedangkan dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis kendala dari Minimnya akses bagi penyelenggara juga berdampak hingga ke pendataan masyarakat yang dilakukan pada tahap persiapan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan sehingga banyak masyarakat yang hadir ke TPS. Beberapa kesimpulan singkat yang dikutip peneliti dari penelitian sebelumnya diatas menunjukkan bahwa para peneliti sebelumnya hanya meneliti tentang hasil dari partisipasi politik tersebut dan hanya mengetahui penyebab dari hasil penelitian tentang partisipasi politik dimaksud. Pada penelitian ini, peneliti akan menganalisis apa saja faktor yang memengaruhi partisipasi politik pada pilkada 2018 di Kabupaten Timor Tengah Selatan serta mengetahui strategi yang dimiliki oleh pemerintah untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

### **3.6. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)**

Penulis menemukan faktor yang mendukung terhadap adanya partisipasi politik masyarakat yaitu adanya sentimen primordial yang masih tinggi di tingkat lokal terkhususnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan sehingga memberikan dampak terhadap semangat masyarakat dalam memperjuangkan nama sukunya melalui ikut berpartisipasi pada pemilihan kepala daerah.

## **IV. KESIMPULAN**

Partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang diteliti oleh penulis berdasarkan teori Miriam Budiardjo (2008) dapat dikatakan belum maksimal. Kegiatan pilkada tahun 2018 di Kabupaten Timor Tengah Selatan telah diselenggarakan dengan baik oleh pihak penyelenggara yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan. Akan tetapi, partisipasi masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2018 relatif masih rendah, yaitu sebesar 73,50% jika dibandingkan dengan tahun 2008 sebesar 86,99% dan tahun 2013 sebesar 73,81%. Hal tersebut diakibatkan kurangnya kesadaran dari masyarakat betapa pentingnya hak pilih mereka terhadap hasil dari pelaksanaan pilkada tersebut. Penulis juga menemukan bahwa adanya aktivitas melobi dari masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam pelaksanaan pilkada tahun 2018 di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Namun, jika berbicara mengenai aktivitas organisasi masyarakat yang dibentuk dengan tujuan politik maka hal itu memang masih kurang dan tidak ada di Kabupaten Timor Tengah Selatan, sehingga pihak organisasi yang bergerak aktif di bidang politik hanyalah partai politik yang merupakan peserta pelaksanaan pilkada tahun 2018. Faktor penghambat tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Selatan pada saat pelaksanaan pilkada tahun 2018 adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri dan minimnya fasilitas atau akses yang harus ditempuh oleh panitia penyelenggara pilkada tersebut ke daerah terpencil sehingga dapat dikatakan rumit bagi panitia penyelenggara untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat di tempat terpencil. Minimnya akses bagi penyelenggara juga berdampak hingga ke pendataan masyarakat yang dilakukan pada tahap persiapan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan



sehingga banyak masyarakat yang hadir ke TPS pada saat pemilihan dan melaksanakan pemilihan menggunakan KTP atau Kartu Keluarga.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga tidak sempat menggali secara mendalam terkait bagaimana politik identitas memainkan perannya untuk mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Politik Identitas dalam Pilkada Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

Amanda, L., Yanuar, F., & Devianto, D. (2019). Uji validitas dan reliabilitas tingkat partisipasi politik masyarakat kota Padang. *Jurnal Matematika UNAND*, 8(1), 179–188.

Arniti, N. K. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 329–348.

Budiardjo, M. (2003). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia pustaka utama.

Darna, N. (2019). *Analisis Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilkada Kabupaten Ciamis Tahun 2018*.

Hendrik, D. (2010). Variabel-variabel yang mempengaruhi rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam pilkada walikota dan wakil walikota Padang tahun 2008. *Jurnal Demokrasi*, 9(2).

Nasution, S. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, cet. III. Bandung: PT. Tarsito.

P, P. M. (2016). Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Sosialisasi Pemilu sebagai Upaya untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilu Presiden 2014 di Kalimantan Timur. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(1).

Rizqi, S. K. (2018). Partisipasi Politik Masyarakat pada PILKADA 2017 di Kabupaten Yalimo, Papua, Indonesia. *SOSIOHUMANIKA*, 11(1), 109–124.

Sa'ban, L. M. A., & Wijaya, A. A. M. (2018). Kurangnya Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Wakatobi. *MEDIALOG: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(2), 35–43.

Sugiyono. (2016). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.